



Kota Karismatik
MADIUN



**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH
KOTA MADIUN
TAHUN 2018**

TAHUN 2019

KOTA MADIUN

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Madiun untuk Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Madiun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Madiun, 28 Maret 2019


INSPEKTUR KOTA MADIUN

Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda
NIP.19640522 199003 2 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun tahun 2018 berhasil diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, maka perlu disusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Madiun tahun 2018 merupakan bentuk pengungkapan keberhasilan ataupun menjelaskan ketidakberhasilan pencapaian target kinerja yang telah dijanjikan pada tahun 2018. Selain itu Laporan Kinerja merupakan rangkaian proses akuntabilitas penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019 dalam perencanaan sasaran, program dan kegiatan tahunan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini diupayakan untuk menyampaikan kinerja Pemerintah Kota Madiun atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja maka dalam penyusunan Laporan Kinerja perlu terus diupayakan penyempurnaan, terutama dukungan ketersediaan data kinerja yang baku, valid, serta handal. Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka masukan dari semua pihak sangat diharapkan, sehingga akan memberikan dukungan demi terwujudnya *good governance* di Kota Madiun.

Madiun, 28 Maret 2019

WALIKOTA MADIUN

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Daerah	2
1. Kondisi Geografis	2
2. Kondisi Demografis	4
3. Kondisi Ekonomi	9
C. Struktur Organisasi	12
D. Isu Strategis	15
E. Inovasi yang telah dilakukan Kota Madiun dalam upaya peningkatan Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ..	15
F. Sistematika	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2015-2019	18
1. Visi	19
2. Misi	21
3. Tujuan Pembangunan	22
4. Sasaran Pembangunan	22
B. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	27
1. Metode Pengukuran Capaian Kinerja	28
2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran	28
3. Hasil Pengukuran dan Analisis Capaian kinerja	29
B. Akuntabilitas Keuangan	56
BAB IV PENUTUP	62
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Karakteristik Penduduk Kota Madiun Tahun 2014-2018	6
Tabel I.2	Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2014 s.d 2018	9
Tabel I.3	PDRB Kota Madiun menurut Lapangan Usaha.....	10
Tabel I.4	Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun.....	11
Tabel I.5	Perkembangan IPM Kota Madiun 2014 s.d 2018.....	12
Tabel II.1	Visi RPJPD dan RPJMD	19
Tabel II.2	Visi dan Misi RPJMD.....	21
Tabel II.3	Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD	22
Tabel II.4	Target Kinerja Sasaran Akhir RPJMD	23
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	25
Tabel III.1	Metode Penyimpulan Capaian Sasaran	29
Tabel III.2	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	29
Tabel III.3	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan	31
Tabel III.4	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tatakelola Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	32
Tabel III.5	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	36
Tabel III.6	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan.....	39
Tabel III.7	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.....	41
Tabel III.8	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman dan Prasarana Transportasi Kota.....	43
Tabel III.9	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	45
Tabel III.10	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Penyerapan Tenaga Kerja	47
Tabel III.11	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Unggulan Daerah	50
Tabel III.12	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keamanan, Ketertiban, dan Kerukunan dalam Masyarakat	54
Tabel III.13	Realisasi APBD Kota Madiun Tahun 2018.....	57

Tabel III.14	Realisasi Belanja Langsung untuk program rutin dan operasional seluruh Perangkat Daerah	57
Tabel III.15	Penyerapan Anggaran per Sasaran sesuai APBD Tahun 2018	58
Tabel III.16	Efisiensi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2018.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Wilayah Kota Madiun	3
Gambar I.2	Luas Wilayah Kota Madiun per Kecamatan	4
Gambar I.3	Jumlah RW dan RT.....	4
Gambar I.4	Data Penduduk Kota Madiun berdasarkan jenis domisili Kecamatan	5
Gambar I.5	Kelompok Penduduk Usia Tidak Produktif di Kota Madiun	7
Gambar I.6	Grafik Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif	8
Gambar I.7	Rasio Ketergantungan	8
Gambar III.1	Presentase Usulan Masyarakat Yang di Akomodir dalam RKPD.....	30
Gambar III.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Madiun Tahun 2011-2017.....	32
Gambar III.3	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Madiun Tahun 2011-2018	33
Gambar III.4	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kota Madiun Tahun 2013-2018.....	34
Gambar III.5	Perkembangan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Ma- diun Tahun 2013-2018.....	35
Gambar III.6	Grafik Indeks Pendidikan Kota Madiun.....	39
Gambar III.7	Grafik Pertumbuhan Indeks Angka Harapan Hidup Warga Kota Madiun	42
Gambar III.8	Grafik Perkembangan Nilai Realisasi Investasi	48
Gambar III.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun	48
Gambar III.10	Eksistensi Pasar Tradisional	51
Gambar III.11	Salah Satu Bentuk Pelatihan Industri yang diadakan di Kota Madiun.....	52
Gambar III.12	Benchmarking Logo City Branding Kota Madiun dengan be- berapa Kota Lain.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel selalu menjadi harapan seluruh masyarakat. Perubahan model penyelenggaraan pemerintahan dari yang semula terpusat (sentralistik) menjadi desentralistik dalam koridor otonomi daerah telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah. Meskipun Undang-Undang tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, namun tetap mengusung semangat yang sama, yaitu bahwa pemerintah daerah didorong untuk lebih kreatif dalam berinovasi dan bekerja secara lebih baik dalam mewujudkan *good governance*.

Pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja mutlak diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 meliputi perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Pejabat publik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja dihasilkan oleh suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan.

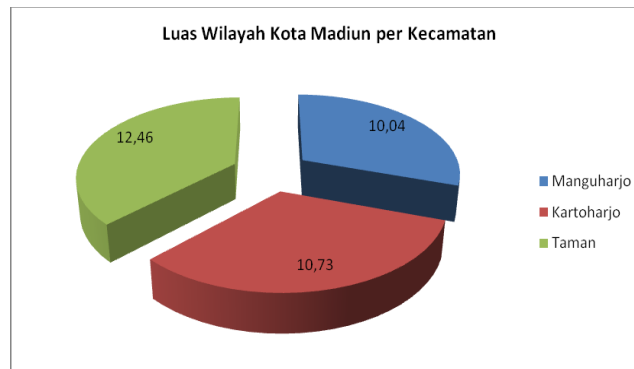
Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 merupakan capaian kinerja yang disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Madiun tahun 2018, yang penyusunannya berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 2014-2019, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, Rencana Kinerja Tahun 2018 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Madiun merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Madiun.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Madiun sebagai salah satu wilayah pemerintahan daerah dibawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mempunyai letak yang strategis karena menjadi perlintasan transportasi darat utama antar provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah di pulau Jawa. Dengan topografi tanahnya yang datar maka Kota Madiun mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta alat transportasi darat lainnya. Hal ini diperkuat dengan Rencana Tata

masing-masing kecamatan terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga total di Kota Madiun terdapat 27 Kelurahan.

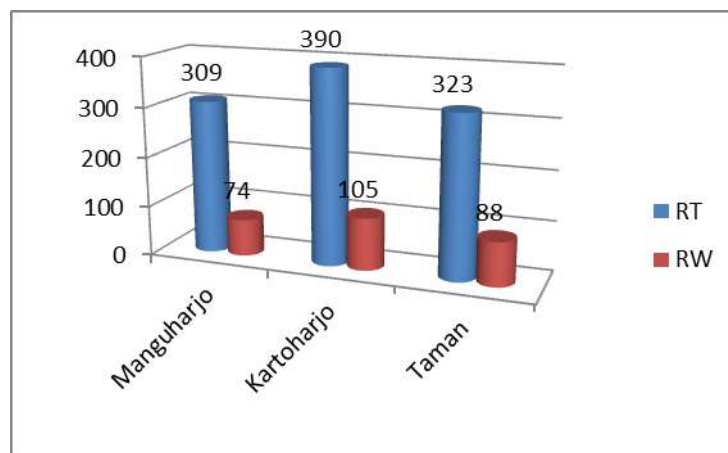


Sumberdata :Kota Madiun Dalam Angka 2018

Gambar I.2

Luas wilayah Kota Madiun per Kecamatan

Adapun jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Madiun adalah 1.022 RT dan 267 RW, dengan rincian pada masing-masing Kecamatan, yaitu sebagaimana grafik berikut :



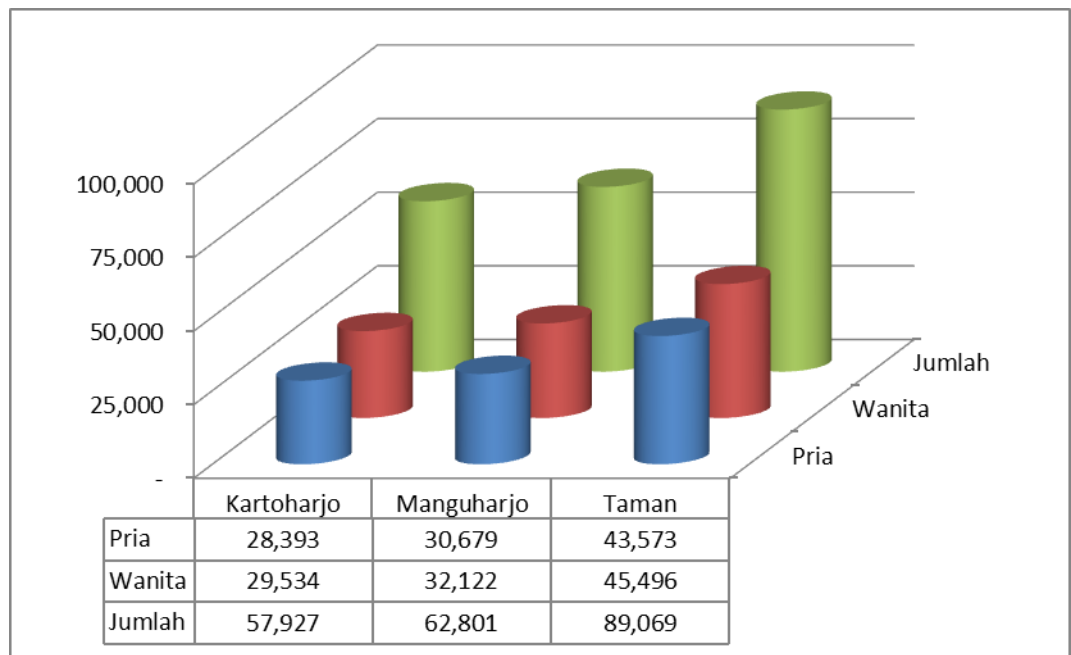
Sumberdata :Kota Madiun Dalam Angka 2018

Gambar I.3

Jumlah RW dan RT menurut kecamatan

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebanyak 209.797 jiwa. Rincian data jumlah penduduk per kecamatan dapat disajikan sebagaimana dilihat pada grafik berikut.



Sumber data : Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Madiun

Gambar I.4

Data Penduduk Kota Madiun berdasarkan jenis domisili kecamatan

Persebaran penduduk serta perbandingan antara penduduk pria dengan wanita pada masing-masing kecamatan di Kota Madiun adalah sebagaimana tersaji pada grafik diatas. Sebagaimana terlihat pada grafik, tidak terdapat perbedaan yang terlalu besar antara banyaknya penduduk pria dengan wanita pada masing-masing kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa persebaran penduduk pria maupun wanita cukup merata diseluruh wilayah masing-masing kecamatan. Dengan persebaran yang relatif merata, diharapkan dapat mempermudah Pemerintah Kota Madiun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena diharapkan tidak terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang terlalu besar antara masing-masing kecamatan.

Sementara itu, data tentang karakteristik penduduk Kota Madiun berdasarkan usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan agama dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dituangkan sebagaimana tabel dibawah ini:

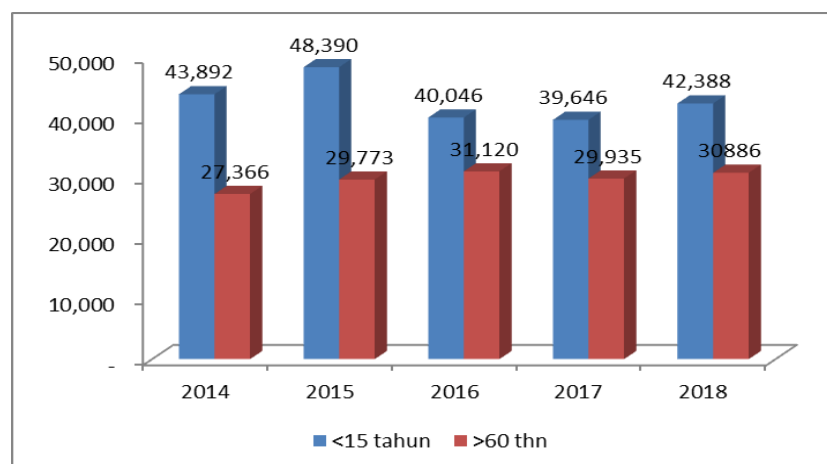
Tabel I.1
Data Karakteristik Penduduk
Kota Madiun Tahun 2014 – 2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Penduduk Berdasarkan Usia :					
	a. Usia 0 - 4 thn	15.430	9.702	9.658	12.169	12.215
	b. Usia 5 - 9 thn	12.025	14.122	14.040	14.186	14.106
	c. Usia 10 – 14 thn	20.935	16.222	15.948	16.033	15.520
	d. Usia 15 – 19 thn	13.421	18.280	18.408	17.519	17.246
	e. Usia 20 – 24 thn	16.731	14.551	14.888	14.873	15.147
	f. Usia 25 – 29 thn	11.678	13.340	13.841	13.862	14.020
	g. Usia 30 – 34 thn	21.768	16.338	15.399	15.284	14.605
	h. Usia 35 – 39 thn	14.434	17.462	17.657	17.499	17.340
	i. Usia 40 – 44 thn	20.033	16.764	16.673	16.542	16.660
	j. Usia 45 – 49 thn	12.125	15.642	16.140	15.975	15.744
	k. Usia 50 – 54 thn	15.976	13.746	13.832	13.688	13.945
	l. Usia 55 – 59 thn	9.077	12.306	12.433	12.244	12.357
	m. Usia ≥60 thn	27.366	29.773	31.120	29.935	30.886
2.	Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
	a. Belum Sekolah;	31.218	30.989	31.740	32.430	31.258
	b. Tidak Tamat SD;	18.383	18.575	18.695	18.755	19.575
	c. Tamat SD;	33.767	32.950	32.318	30.919	30.169
	d. Tamat SLTP;	30.247	30.155	30.342	29.836	29.487
	e. Tamat SLTA;	71.142	69.799	70.756	71.494	72.405
	f. Tamat D-I/II;	448	440	439	452	468
	g. Tamat D-III;	5.624	5.507	5.557	5.566	5.639
	h. Tamat S-1;	18.985	18.608	18.929	19.065	19.431
	i. Tamat S-2;	1.169	1.205	1.238	1.268	1.334
	j. Tamat S-3.	16	20	23	24	31

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
3	Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan :					
	a. Belum/Tidak bekerja	39.214	38.404	35.539	35.539	36.721
	b. PRT	35.064	34.603	35.328	35.3284	34.606
	c. Pelajar/Mahasiswa	43.158	43.581	45.352	5.352	45.119
	d. Pensiunan	6.509	6.374	6.399	6.399	6.237
	e. PNS	7.623	7.379	7.396	7.396	6.992
	f. TNI	1.952	1.850	1.942	1.942	1.806
	g. POLRI	1.060	1.048	1.057	1.057	1.040
	h. Jasa	5.058	8.608	8.720	8.720	7.788
	i. Karyawan	42.745	42.126	43.735	43.735	44.679
	j. Buruh	5.115	5.082	5.074	5.074	5.509
	k. Wiraswasta	18.687	18.727	19.060	19.060	18.945
	l. Pekerjaan Lainnya	4.814	466	434	434	355

Sumber data : Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Madiun

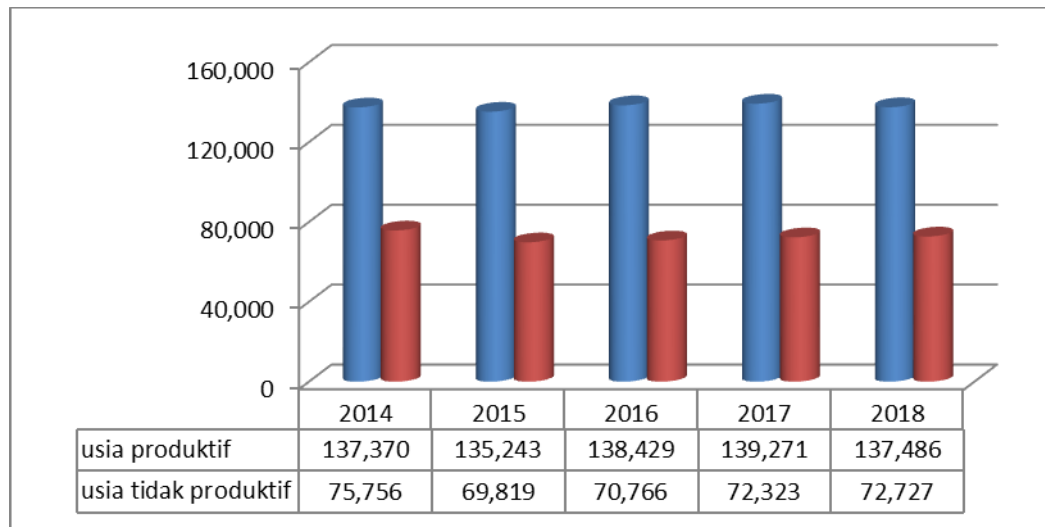
Dari tabel di atas berdasarkan kelompok usia penduduk Kota Madiun dapat digolongkan ke dalam penduduk usia produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah kelompok penduduk usia 15 - 60 tahun, sedangkan penduduk usia tidak produktif adalah kelompok penduduk usia <15 tahun dan ≥60 tahun. Pada kelompok penduduk usia tidak produktif, proporsi penduduk usia <15 tahun lebih besar dari pada penduduk usia ≥60 tahun. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 1.5

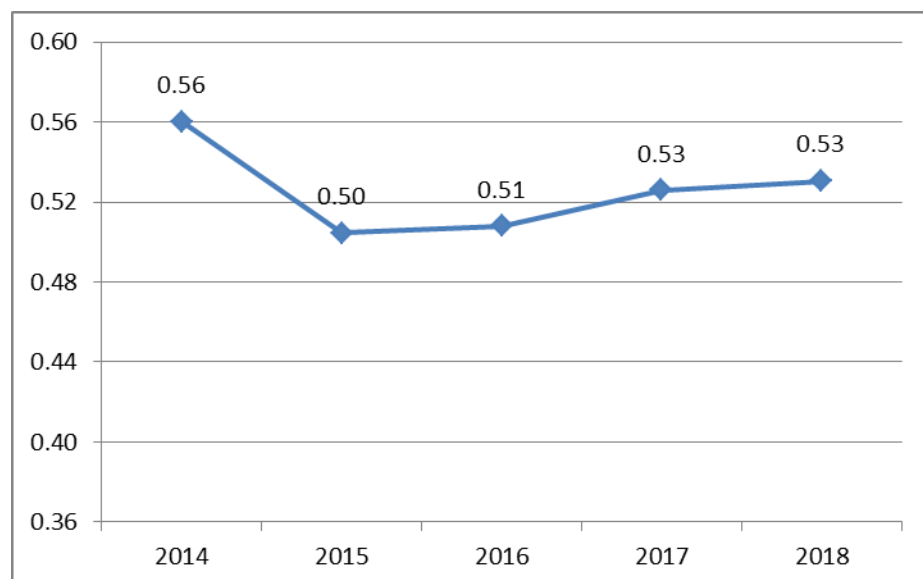
Kelompok Penduduk Usia Tidak Produktif di Kota Madiun

Sedangkan perbandingan jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif disajikan sebagaimana gambar berikut.



Gambar I.6
Grafik Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif

Dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Dengan membandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap jumlah penduduk usia produktif dapat diketahui rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan selama periode 2014-2018 adalah sebagaimana gambar dibawah :



Gambar I.7
Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan pada tahun 2014 menunjukkan angka 0,56 (56%), hal ini berarti bahwa pada setiap seratus orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 56 orang usia tidak produktif. Angka rasio ketergantungan menunjukkan trend yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 2018 sudah mencapai angka 0,53 (53%), yang berarti bahwa pada setiap seratus orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 53 orang usia tidak produktif.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan pada kedudukan, fungsi dan peranan Kota Madiun sebagai subsentra pengembangan Wilayah Jawa Timur di bagian barat, luas wilayah yang relatif kecil, serta dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki, Kota Madiun lebih menitikberatkan pengembangan pada sektor perdagangan dan jasa, baik jasa pendidikan, kesehatan, jasa keuangan dan jasa-jasa lainnya. Sektor-sektor itulah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun.

Tabel I. 2.
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2014 s/d 2018 (Rp. Milyar)

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2014	9.214,2	7.965,5	6,62
2015	10.192,1	8.455,4	6,15
2016	11.185,1	8.954,7	5,90
2017	12.140,2	9.486,1	5,93
2018**)	12.209,1	9.488,0	5,96

Sumberdata :BPS Kota Madiun, angka sementara

Seperti terlihat pada Tabel I.2, PDRB Kota Madiun menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, baik PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Penghitungan dengan menggunakan tahun dasar tahun 2014, besarnya PDRB Kota Madiun tahun 2014 baru mencapai 9.214,2 milyar rupiah. Angka tersebut terus mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 2018 sudah mencapai sebesar 9.488,0 milyar rupiah (ADHK) dan 12.209,1 milyar rupiah (ADHB).

Potensi ekonomi Kota Madiun yang tidak memiliki sumber daya alam (SDA) dan lahan pertanian yang terbatas, maka upaya mendorong pertumbuhan perekonomiannya mengandalkan pada sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil, industri pengolahan, dan sektor informasi dan komunikasi. Potensi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil, dan sektor informasi dan komunikasi tumbuh paling tinggi dan kontribusinya paling besar terhadap perekonomian Kota Madiun dan nilai perbandingan absolut antar kabupaten/ kota Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tabel I.3
PDRB Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha

SEKTOR		NILAI PDRB ADHB (Rp. JUTA)			
		2015	2016	2017	2018*
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	98.020,1	102.288,5	100.958,5	99.191,8
	Pertambangan dan Penggalian	2.477,4	2.616,4	2.727,4	2.906,6
	Industri Pengolahan	1.637.081,5	1.807.895,0	1.991.440,2	2.095.797,2
	Pengadaan Listrik dan Gas	7.775,3	8.393,3	9.820,3	10.454,7
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.645,1	24.461,4	26.744,4	29.109,5
	Konstruksi	664.080,2	718.117,5	767.940,9	823.107,1
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.529.951,0	2.791.973,3	3.051.458,8	3.289.129,5
	Transportasi dan Pergudangan	321.165,2	360.088,4	407.727,1	459.090,9
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	464.842,5	523.628,0	574.364,4	629.380,0
	Informasi dan Komunikasi	1.393.956,6	1.524.590,8	1.660.030,1	1.834.504,9
	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.056.626,6	1.177.737,2	1.259.761,0	1.388.196,0
	Real Estate	274.014,6	297.817,3	318.811,7	355.584,5
	Jasa Perusahaan	69.258,5	75.725,3	82.453,6	90.302,3
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	329.408,9	350.207,4	366.763,0	384.280,7

	Jasa Pendidikan	802.998,2	862.990,1	923.493,1	1.008.647,1
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	131.102,2	141.938,6	155.984,0	174.231,7
	Jasa lainnya	386.663,5	413.640,8	439.721,9	476.944,2
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10.192.067,5	11.184.109,4	12.140.200,5	13.150.858,7

Sumber : PDRB Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha 2013-2017, BPS Kota Madiun

*) Angka sementara, Tim Penyusun dan Perumus LKPJ 2018 Kota Madiun

Pertumbuhan ekonomi juga terus menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata-rata selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi baik Nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Pendapatan perkapita juga terus mengalami kenaikan, serta inflasi yang cenderung menurun dan didukung oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya dan pemerintahan yang stabil dan kondusif merupakan potensi yang baik bagi perkembangan Kota Madiun.

Tabel I.4
Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun

Kategori		2015	2016	2017	2018*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,58	1,31	-1,78	-3,14
B	Pertambangan dan Penggalian	1,98	1,91	2,31	1,07
C	Industri Pengolahan	6,51	7,21	8,00	4,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,73	3,86	4,91	5,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,58	3,82	6,84	4,44
F	Konstruksi	5,48	4,44	5,57	5,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,48	5,11	5,83	5,95
H	Transportasi dan Pergudangan	6,78	7,13	8,18	7,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,28	7,30	7,47	7,24
J	Informasi dan Komunikasi	8,13	6,64	6,77	6,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,52	7,11	3,88	7,49
L	Real Estate	6,76	5,64	4,22	6,74
M,N	Jasa Perusahaan	8,41	5,94	6,34	8,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	3,05	2,46	4,67

P	Jasa Pendidikan	6,30	5,14	4,50	6,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,35	5,85	5,93	8,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,28	4,17	4,14	4,62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,15	5,90	5,93	5,98

Sumberdata :BPS Kota Madiun

b. Indeks Pembangunan Manusia

Tabel I.5
Perkembangan IPM Kota Madiun 2014 – 2018

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016	2017	2018**
Kota Madiun	78,81	79,48	80,01	80,13	80,15
Jawa Timur		68,95	69,74	70,27	

Sumber Data : BPS Kota Madiun, angka sangat sementara

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun sebagaimana tersaji dalam grafik diatas menunjukkan tren yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, IPM Kota Madiun baru mencapai angka 78,81. Angka tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 2018 IPM Kota Madiun sudah mencapai angka 80,15, masih di atas rata-rata tingkat Provinsi maupun Nasional.

C Struktur Organisasi

Sebagai konsekuensi dari Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Madiun melakukan penataan kembali susunan perangkat daerahnya melalui Peraturan Daerah Kota Madiun No. 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun meliputi :

1. Sekretariat Daerah, tipe C, merupakan unsur staf
2. Sekretariat DPRD, tipe C, merupakan unsure pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD

3. Inspektorat Daerah, tipe B, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
 - b. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, dan bidang kepemudaan dan olah raga
 - c. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang social, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - f. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - g. Dinas Perdagangan, tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan
 - h. Dinas Tenaga Kerja, tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika, tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic dan bidang persandian
 - j. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, tipe C,

- menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- k. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan
 - l. Dinas Perhubungan, tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan
 - n. Dinas Lingkungan Hidup, tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
 - o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan
 - p. Satuan Polisi Pamong Praja, tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
5. Badan Daerah, terdiri dari:
- a. Badan Kepegawaian Daerah, tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
 - c. Badan Pendapatan Daerah, tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan
6. Kecamatan, terdiri dari:
- a. Kecamatan Kartoharjo, tipe A
 - b. Kecamatan Manguharjo, tipe A

c. Kecamatan Taman, tipe A

D Isu Strategis

1. Terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang salah satunya mengatur adanya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pelimpahan sebagian urusan kepada pemerintah kabupaten / kota, serta penarikan sebagian kewenangan urusan pemerintahan kembali ke pemerintah pusat, membawa konsekuensi penataan kembali susunan dan nomenklatur perangkat daerah.
2. Tuntutan untuk segera melakukan integrasi sistem manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporan. Integrasi tersebut diperlukan dalam upaya menjamin konsistensi dan kesinambungan dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, efektif dan efisien.

E Inovasi yang dilakukan Kota Madiun Dalam Upaya Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. Penerapan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja mulai tahun 2018

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Madiun sudah melakukan perubahan tata cara pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN nya dari yang semula hanya didasarkan pada tingkat kehadiran pegawai saja (Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja), menjadi Tambahan penghasilan berdasarkan pada beban kerja serta pertimbangan obyektif lainnya. Perubahan tersebut diharapkan

dapat meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kesejahteraan pegawai, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh pegawai. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja didasarkan pada perhitungan nilai jabatan yang diperoleh dari analisis jabatan. Berdasarkan nilai jabatan, selanjutnya dibuat pengelompokan kelas-kelas jabatan. Dalam rangka menjaga obyektivitas penghitungan nilai jabatan tersebut, maka Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan pihak akademisi dalam menyusun kajian, mendesain sistem penilaian kinerja pegawai, serta mengembangkan system aplikasi untuk penerapan pemberian tambahan penghasilan tersebut.

2. Pengembangan penerapan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja

Sebagai salah satu upaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan pelaksanaan implementasi SAKIP, maka Kota Madiun mulai mengembangkan penerapan perjanjian kinerja mulai dari tingkat Walikota sampai dengan seluruh pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, baik yang menduduki jabatan struktural maupun jabatan pelaksana. Kemudian juga dikembangkan penyusunan Laporan Kinerja jabatan, mulai dari tingkat kepala perangkat daerah sampai dengan jabatan pelaksana sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah dibuat masing-masing pejabat pada tahun sebelumnya. Pengembangan penerapan perjanjian kinerja jabatan pelaksana serta laporan kinerja jabatan struktural tersebut dilaksanakan mulai tahun 2018.

F. Sistematika

Sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Gambaran Umum Daerah (Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Ekonomi), Struktur Organisasi, isu strategis, serta inovasi yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Madiun.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar perjanjian kinerja, pelaksanaan program kegiatan anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 meliputi RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Uraian tentang capaian kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018, sesuai dengan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019, meliputi pengukuran kinerja, perkembangan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran, evaluasi dan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja, serta realisasi keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Uraian tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, berbasis data yang akurat, maka diharapkan dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat, efektif dan efisien guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Madiun, merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Walikota sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat dan para wakil rakyat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional. RPJMD Kota Madiun memuat gambaran umum kondisi kota madiun, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, isu-isu strategis dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014–2019 ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan

perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 disusun dengan strategi **keberlanjutan** yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan sosial, ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu instansi yang berwenang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun yang berkewajiban meningkatkan pembangunan disegala bidang dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menyusun perencanaan ini, sehingga terwujud satu kesatuan perencanaan yang dapat berjalan sesuai dengan keputusan bersama dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Visi

Berdasarkan pada gambaran dan analisa kondisi eksisting dan tantangan makro yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun mendatang serta potensi wilayah yang dimiliki dan dapat untuk lebih dikembangkan, maka ditetapkan visi Kota Madiun dalam RPJPD tahun 2005 – 2025 dan selanjutnya berdasarkan visi pembangunan jangka panjang tersebut di tetapkan visi pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Visi RPJPD dan RPJMD

PERIODE	VISI
RPJPD 2005-2025	Terwujudnya Kota Madiun Sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera
RPJMD 2014-2019	Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera

**Keterkaitan RPJPD
dengan RPJMD**

**Terwujudnya Masyarakat yang Lebih
Maju dan Sejahtera Melalui Optimalisasi
Peran Kota Madiun Sebagai Pusat
Perdagangan dan Jasa Skala SWP**

Dalam dokumen ini dijabarkan pengertian atau makna dari maju dan sejahtera. Makna “Kemajuan” berkaitan dengan kondisi yang terus-menerus berkarya dengan dilandasi falsafah bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Pengertian maju secara sederhana antara lain mencakup bidang IPOLEKSOSBUD, melalui peningkatan indikator ekonomi, indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan penerapan indikator *good governance*.

Makna “Sejahtera” berhubungan dengan kemajuan Kota Madiun di segala aspek kehidupan yang harus mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Ukuran dasar kesejahteraan yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok (*basic need*) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang terdistribusi secara proporsional dan adil dalam seluruh struktur dan lapisan masyarakat. Persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan ditangani secara komprehensif dan proporsional. Semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, dapat menyatakan pendapat dan aspirasinya secara demokratis dan memperoleh perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Aspek kesejahteraan disini mencakup juga aspek batiniah dan religiusitas yang secara operasional tercermin dalam kerukunan umat beragama dan perilaku yang dilandasi budi pekerti luhur dalam pergaulan hidup keseharian warga masyarakat

Visi yang telah ditetapkan tersebut akan tercapai dengan cara mewujudkannya pada 4 (empat) elemen kehidupan kota yaitu Pemerintahan, Masyarakat, Swasta, dan Lingkungan. Pemerintahan

dikatakan sejahtera apabila pemerintahan tersebut telah mampu memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar para pegawainya. Untuk masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, perwujudannya adalah rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kesejahteraan swasta dapat tercapai apabila ditandai dengan peningkatan pendapatan atau laba dari hasil usaha ekonominya dan terwujudnya persaingan yang sehat. Lingkungan yang sejahtera adalah lingkungan yang tata ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan mendukung kelestarian alam dan keanekaragaman hayati.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sebagai penjabaran atas visi tersebut, dirumuskan misionis selama masa jabatan 2014-2019 sebagai berikut :

Tabel II.2 Visi dan Misi RPJMD

VISI "Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera"	
M I S I	1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat
	2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa
	3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
	4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

Berbagai misi dan orientasi pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya. Untuk

mengimplementasikan keseluruhan tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada pada tahun awal perencanaan.

3. Tujuan Pembangunan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari misi atau orientasi pembangunan atau sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kota Madiun secara umum. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kota Madiun, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan bertitik tolak pada arah misi atau orientasi pembangunan, tujuan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel II.3 Visi, Misi dan Tujuan RPJMD

Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera		
NO	MISI	TUJUAN
1	Mewujudkan Pembangunan Berbasis pada Partisipasi Masyarakat	Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar
4	Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

4. Sasaran Pembangunan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Madiun selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Target Kinerja Sasaran Akhir RPJMD

Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan				
Sasaran Strategis			Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2019
1.1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPd	81%
1.1.2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,89
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik				
Sasaran Strategis			Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2019
2.1.1	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat tinggi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	BB
			Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5
2.1.2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah		Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
			Tingkat keterbukaan informasi publik	A

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2019
3.1.1	Meningkatnya Akualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	0,76
3.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,31 tahun
3.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Indeks Layanan Infra-struktur dan Trans-portasi Kota	98,17%
3.1.4	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Ling-kungan Hidup	68,51
		Presentase pemanfaa-tan ruang sesuai RTRW	100%
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2019
4.1.1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Persentase pertum-buhan nilai investasi	3,14%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,08%
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	23,86%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	17,2%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,29%
4.1.3	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ket-ertiban, Ketentraman dan Keindahan)	98%
		Persentase potensi konflik yang diselesaikan	100%

B. Perjanjian Kinerja

RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019, selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam rencana kinerja tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut beserta dengan alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Besaran target kinerja yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Madiun tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Terwujudnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2018
1.1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPd	79%
1.1.2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,75
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2018
2.1.1	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat tinggi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79
2.1.2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP

		Tingkat keterbukaan informasi publik	B
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2018
3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	0,76
3.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,50 tahun
3.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Indeks Layanan Infrastruktur dan Transportasi Kota	93,52%
3.1.4	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,16
		Presentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2018
4.1.1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Persentase pertumbuhan nilai investasi	-75,95%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,55%
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	23,71%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	17,16%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,17%
4.1.3	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat	Persentase potensi konflik yang diselesaikan	100%
		Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	97%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Dalam hal ini, Laporan Kinerja (LKj) pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun tahun 2014 - 2019.

A. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Metode pengukuran dan penyimpulan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Metode pengukuran capaian kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana (target) dan realisasi sebagai berikut:

- (1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat

sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel III.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1	$X \geq 100 \%$	Sangat Baik
2	$85 \% \leq X < 100 \%$	Baik
3	$60 \% \leq X < 85 \%$	Cukup Baik
4	$X < 60 \%$	Kurang Baik

3) Hasil Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

3.1. Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	79%	79,63%	100,80	Sangat baik

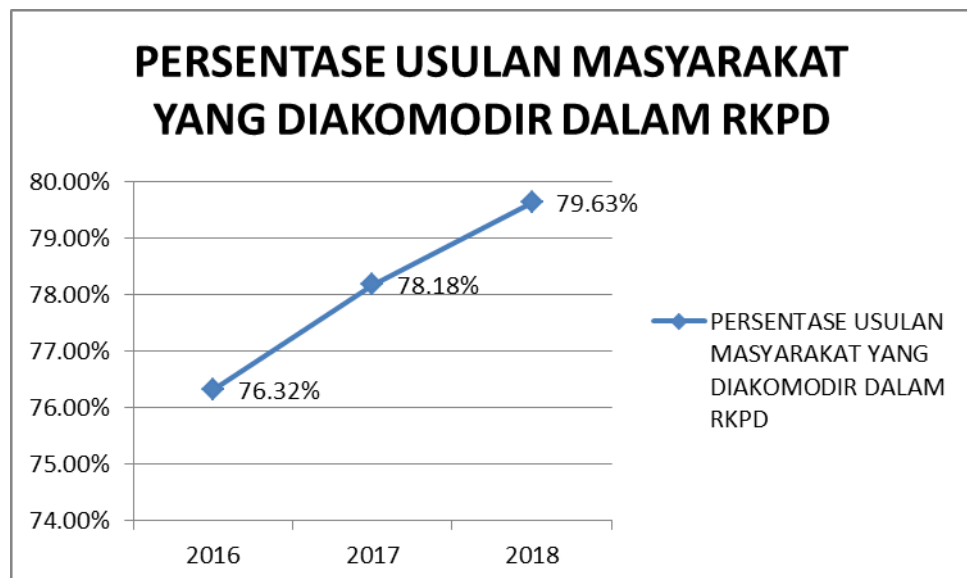
Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Madiun

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan yang diukur menggunakan indikator persentase usulan masyarakat yang diakomodir

dalam RKPD dapat dihitung dengan membandingkan jumlah jenis usulan yang masuk RKPD dibagi jumlah jenis usulan masyarakat dikali 100%.

Pada tahun 2016 jumlah jenis usulan yang masuk RKPD sebanyak 29 jenis usulan dan jumlah jenis usulan masyarakat sebanyak 38 jenis usulan sehingga realisasi yang didapat sebesar 76,32%. Untuk tahun 2017 jumlah jenis usulan yang masuk RKPD sebanyak 43 jenis usulan dan jenis usulan masyarakat sebanyak 55 jenis usulan sehingga didapatkan realisasi 78,18%. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah jenis usulan yang masuk RKPD sebanyak 43 jenis usulan dan jumlah jenis usulan masyarakat sebanyak 54 jenis usulan sehingga realisasi yang didapat sebesar 79,63%. Sedangkan untuk capaiannya sebesar 100,80%.

Realisasi indikator sasaran presentase usulan masyarakat yang diakomodir RKPD dari tahun 2016 sampai 2018 cenderung mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar III.1

Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2018 adalah dengan adanya Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

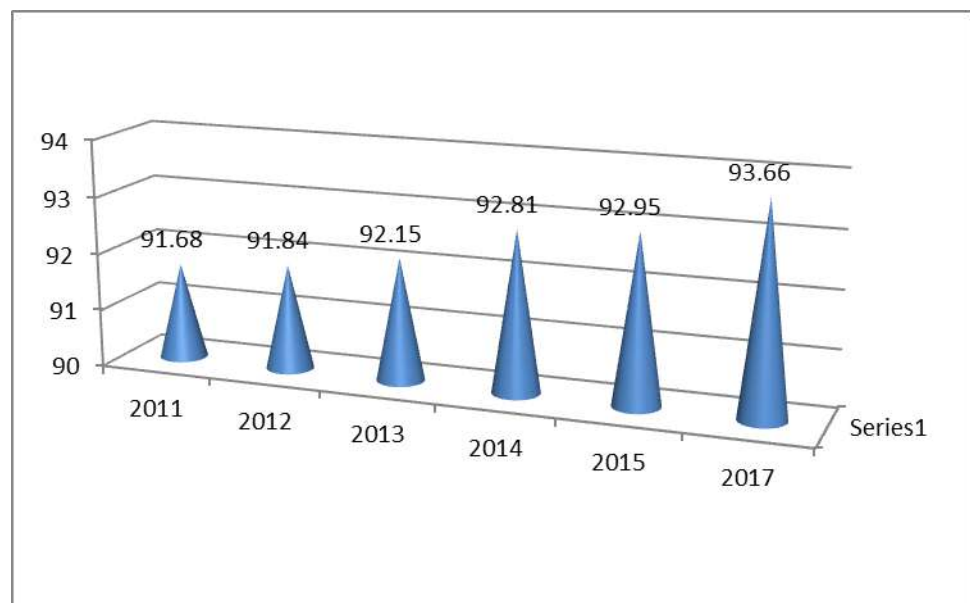
Sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Indeks Pembangunan Gender	93,75	93,66*	99,90	Baik

Keterangan : * data realisasi BPS tahun 2017

Indikator kinerja yang bisa menggambarkan pencapaian sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks ini mirip dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan gabungan dari angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan, namun dalam penghitungannya mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara laki-laki dengan perempuan. Pada tahun 2018, ditargetkan besarnya nilai IPG Kota Madiun adalah sebesar 93,75. Namun demikian sampai dengan saat disusunnya laporan saat ini, data yang berhasil didapatkan adalah masih data IPG tahun 2017, yaitu sebesar 93,66. Sehingga apabila kedua angka tersebut dibandingkan, maka capaian kinerja indikator tersebut masih sudah berhasil memenuhi target dengan capaian sebesar 99,90 % (perhitungan sementara). Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Gender Kota Madiun dari tahun 2011 sampai dengan 2017 adalah sebagaimana gambar dibawah ini. Terlihat bahwa indeks tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.



Gambar III.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Madiun tahun 2011-2017

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2018 adalah :

1. Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan gender dalam pembangunan
2. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak

Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

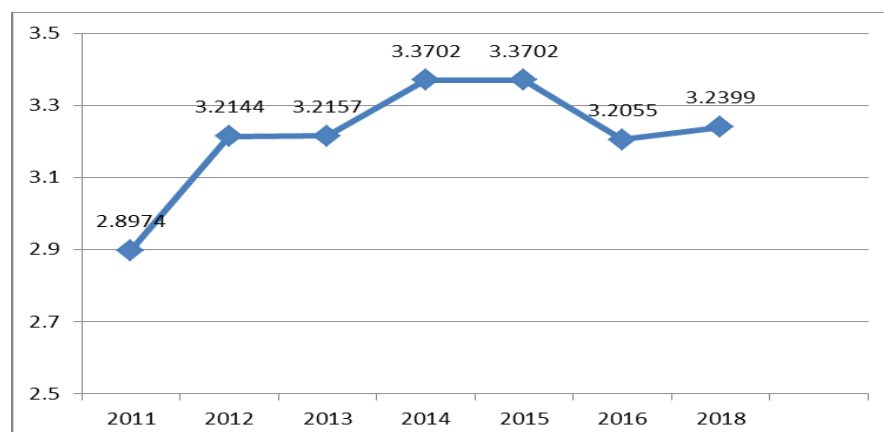
Tabel III.4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah					
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
a.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat tinggi	Sangat tinggi	100	Sangat Baik
b.	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kota	BB	B	96	Baik
c.	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	82,85	104	Sangat Baik

Sumber data : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Bagian Organisasi Kota Madiun
Tahun 2018

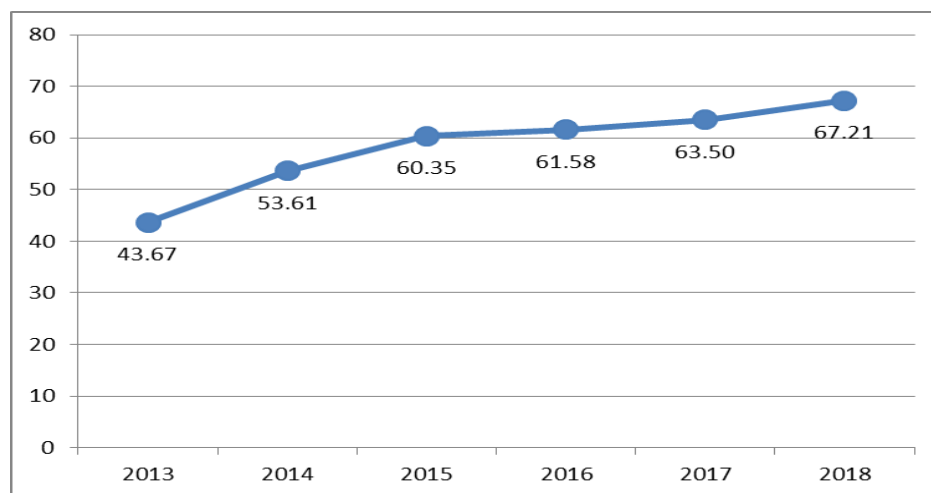
Dalam era manajemen pemerintahan modern, aparatur pemerintah dituntut untuk meningkatkan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas, baik akuntabilitas kinerja maupun keuangan. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kota Madiun. Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, ditetapkan seperangkat indikator kinerja yaitu nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, serta Indeks Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 3 (tiga) indikator kinerja, hanya 2 (dua) indikator yang sudah berhasil mencapai target sebagaimana yang ditetapkan. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 53 Tahun 2018 tentang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Untuk indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Madiun Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak ditampilkan (N/A, Not Available). Sedangkan pada Tahun 2018 Kota Madiun mendapatkan predikat Sangat Tinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tingkat Nasional sebagaimana dalam grafik dibawah.



Gambar III.3 Nilai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Madiun tahun 2011-2018

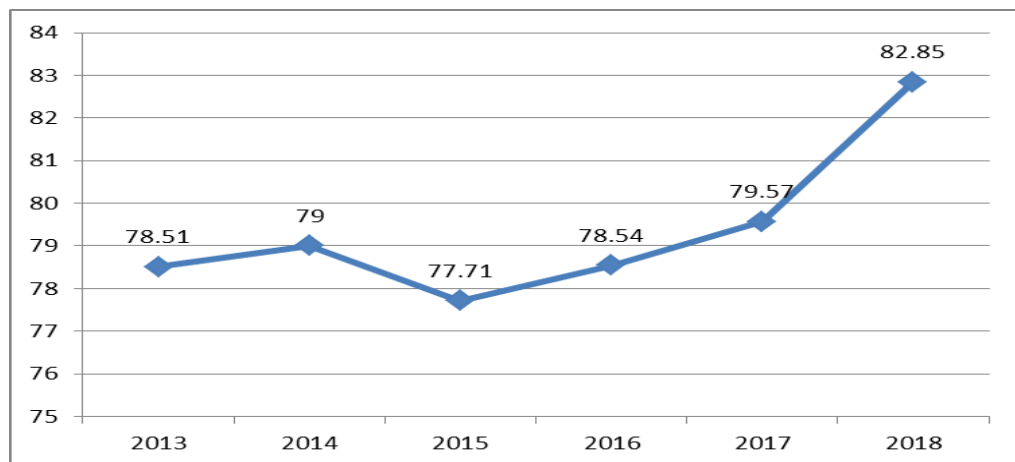
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan nilai yang diperoleh oleh pemerintah daerah atas hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masing-masing, yang penilaiannya dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : B/1351/AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, hasil evaluasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai 67,21 atau dengan predikat "B". Nilai tersebut belum berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2018 yaitu diatas 70 atau predikat "BB". Namun demikian nilai tersebut mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan nilai pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 63,50. Sebagaimana tersaji dalam grafik III.4, perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.



Gambar III.4
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kota Madiun
tahun 2013-2018

Sedangkan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. Untuk menjaga obyektivitas dan akurasi data, maka pelaksanaan survey dilaksanakan

oleh pihak ketiga yang dipilih melalui pelelangan. Pada tahun 2018, berdasarkan hasil survey pada beberapa perangkat daerah dan unit kerja, diperoleh nilai sebesar 82,85. Nilai tersebut telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2018 yaitu sebesar 79, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 104%. Sedangkan perkembangan nilai hasil survey kepuasan masyarakat Kota Madiun dari tahun 2013 sampai dengan 2018 adalah sebagaimana tersaji dalam gambar III.5.



Gambar III.5
Perkembangan hasil survey kepuasan masyarakat
Kota Madiun tahun 2013-2018

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2018 dalam rangka peningkatan tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja antara lain melalui program :

1. Program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah
2. Program perencanaan pembangunan daerah
3. Program Penyelenggaraan Kelurahan
4. Program Penataan Daerah Otonom Baru
5. Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
6. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kendala :

1. Belum tersusunnya proses bisnis secara sempurna yang merupakan mekanisme atau alur dari pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi memenuhi tujuan Pemerintah Daerah.
2. Perumusan indikator RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, DPA, dan Perjanjian Kinerja yang belum sepenuhnya relevan dan berorientasi hasil menyebabkan kesulitan dalam penjabaran visi misi Pemerintah Kota Madiun ke masing-masing Perangkat Daerah.
3. Belum tersusunnya pedoman sebagai mekanisme baku pengumpulan data kinerja dan belum adanya basis data yang terorganisir dengan baik serta kurang maksimalnya evaluasi internal pada masing-masing Perangkat Daerah.

Hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya nilai hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

Upaya Mengatasi :

1. Telah dilakukan bimbingan teknis penyusunan proses bisnis pada tanggal 24 s.d. 25 Januari 2019. Selanjutnya dilakukan penyusunan proses bisnis dengan melibatkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan didampingi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Dilakukan reviu terhadap indikator RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, DPA, dan Perjanjian Kinerja. Untuk penyusunan indikator RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2019 s.d. 2023 telah dilaksanakan asistensi dan verifikasi dengan didampingi oleh Tim dari Universitas Gajah Mada.
3. Dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pengumpulan data maupun verifikasi kinerja dan meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah dengan aparat pengawasan internal Pemerintah atau APIP agar tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara berkala dapat berjalan dan berhasil dengan maksimal.

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel III.5

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah**

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	100	Sangat Baik
Tingkat keterbukaan informasi publik	B	A	Tercapai	Sangat Baik

Keterangan : Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2018

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditetapkan seperangkat indikator kinerja yaitu opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan tingkat keterbukaan informasi publik.

Opini BPK diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya. Opini BPK tahun 2018 diterbitkan atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Madiun tahun 2017 yang mencakup pemeriksaan terhadap : 1. Laporan Realisasi Anggaran, 2. Laporan perubahan saldo akhir kas, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan perubahan ekuitas, 6. Laporan Arus Kas, dan 7. Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK, Laporan keuangan Pemerintah Kota Madiun tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tersebut berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2018 yaitu Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Adapun opini BPK mulai tahun 2013-2018 disajikan dalam tabel berikut.

Hasil Capaian Opini BPK Kota Madiun Tahun 2013-2018

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

Sedangkan tingkat keterbukaan informasi publik merupakan indikator yang digunakan untuk menjalankan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap beberapa indikator yang antara lain meliputi : mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, pelayanan informasi publik, serta pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik. Hasil penilaian tingkat keterbukaan informasi publik Kota Madiun tahun 2018 menunjukkan nilai A sebesar 87,10. Nilai tersebut telah berhasil melampaui target yang ditetapkan tahun 2018 yaitu nilai B dengan nilai range 80-96 (menuju informatif).

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2018 dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain melalui program :

1. Program peningkatan fasilitasi pengadaan barang dan jasa
2. Program peningkatan kapasitas DPRD
3. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
4. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan asset daerah
6. Program peningkatan pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah

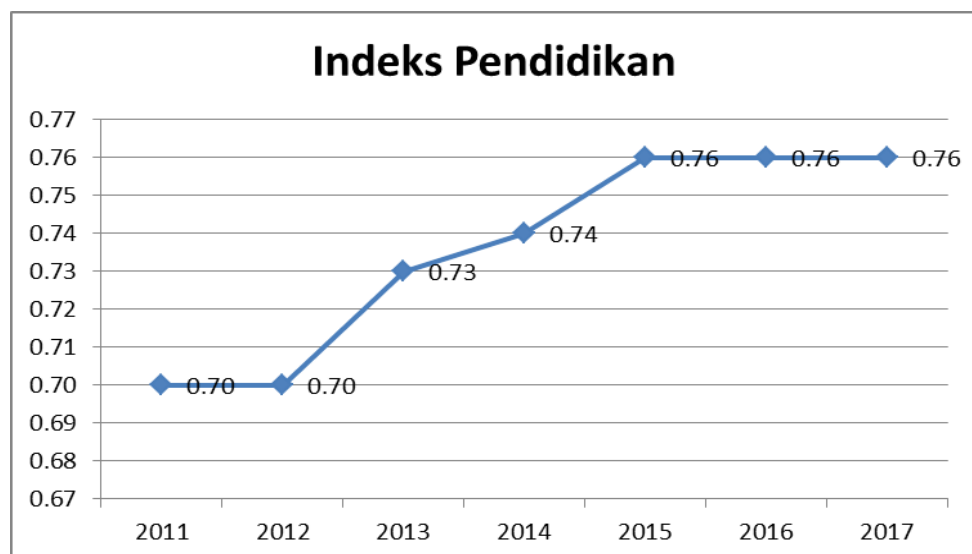
7. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
8. Program pengembangan komunikasi informasi dan media masa

Meningkatnya kualitas pendidikan

Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas Pendidikan

Meningkatnya kualitas pendidikan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Indeks Pendidikan	0,76	0,76*	100	Sangat Baik

Keterangan : *Data BPS tahun 2017, angka sementara



Sumber data BPS Kota Madiun

Gambar III.6 Grafik Indeks Pendidikan Kota Madiun

Angka tersebut berhasil melanjutkan trend tahun-tahun sebelumnya, yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2011 dan 2012 Indeks Pendidikan Kota Madiun baru mencapai angka 0,70. Angka tersebut terus meningkat menjadi 0,73 pada tahun 2013, serta meningkat lagi menjadi 0,74 pada tahun 2014.

Sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mencapai 0,76
Trend kenaikan Indeks Pendidikan sebagaimana tersaji pada grafik.

Indeks Pendidikan merupakan rangkuman dari empat kategori
penilaian antara lain :

1. Angka partisipasi Pendidikan Dasar
2. Angka melek huruf usia 15 tahun ke atas
3. Angka partisipasi menurut kesetaraan gender
4. Angka bertahan siswa hingga kelas V SD

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2018 adalah :

1. Program pendidikan dasar
2. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan
3. Pelaksanaan pendidikan anak usia dini
4. Pelaksanaan pendidikan non formal
5. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
6. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
7. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Kendala :

- a) Belum optimal dan meratanya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang dinamis dan pesat. Perkembangan ini mengharuskan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk secara terus menerus meningkatkan kompetensi yang dimiliki sehingga sebagai ujung tombak pendidikan di lapangan dan sebagai agen pembelajaran dapat mentransfer pengetahuan terkini kepada para anak didiknya setiap waktu.
- b) Belum optimalnya penataan guru sesuai dengan kebutuhan pada satuan pendidikan.

Upaya mengatasi :

- a) Mengoptimalkan peran dan fungsi Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Musyawarah Kerja Kelompok Kepala Sekolah, Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran sebagai wadah kepala sekolah

dan guru dalam meningkatkan kompetensi guru dengan sistem pengimbasan dan memberdayakan guru-guru yang memiliki potensi unggul untuk menjadi pemandu atau instruktur dalam mengimbas-kan pengetahuan dan skill lebih yang mereka miliki sesuai dengan jenjang pendidikan.

- b) Melaksanakan pemetaan guru kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

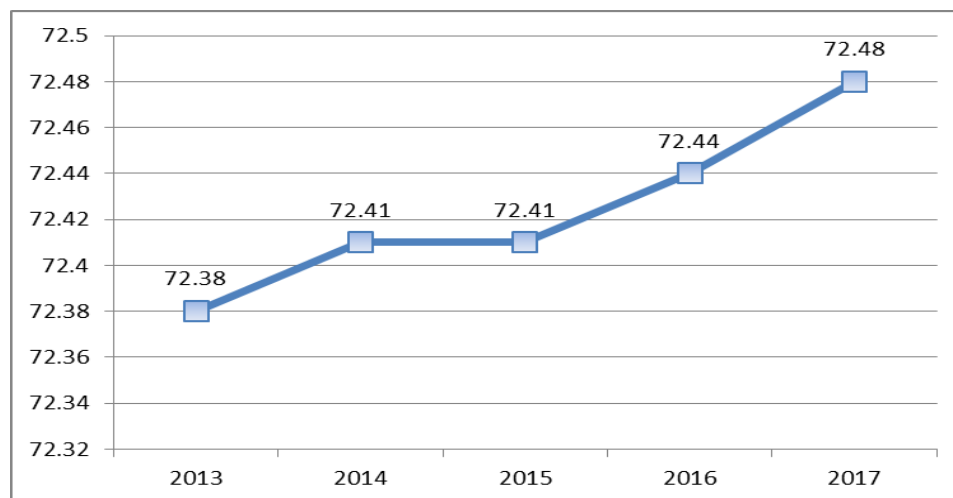
Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Tabel III.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Angka Harapan Hidup (AHH)	72,50 Tahun	72,48* Tahun	99,97	Baik

*Sumber data : *realisasi Data BPS Tahun 2017*

Sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat diukur dengan indikator kinerja yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka menunjukkan semakin panjang pula tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang lahir di daerah itu pada kurun waktu tersebut. Pada tahun 2018, angka harapan hidup Kota Madiun ditargetkan mencapai 72,50 tahun. Berdasarkan Data BPS Tahun 2017, angka harapan hidup di Kota Madiun tahun 2018 adalah sebesar 72,48 tahun. Angka tersebut memang telah berhasil memenuhi target. Angka harapan hidup warga Kota Madiun selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahun, dan hal tersebut akan selalu di dukung oleh perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.



Sumber data : BPS Kota Madiun

Gambar III.7
Grafik Pertumbuhan Indeks Angka Harapan Hidup Warga Kota Madiun

Angka tersebut berhasil melanjutkan trend tahun-tahun sebelumnya, yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2013, angka usia harapan hidup masyarakat Kota Madiun baru mencapai angka 72,38 tahun. Angka tersebut terus meningkat menjadi 72,41 tahun pada tahun 2014 sampai dengan 2015, serta meningkat lagi menjadi 72,44 pada tahun 2016, serta 72,48 pada tahun 2017. Trend kenaikan angka harapan hidup sebagaimana tersaji pada grafik di atas.

Dari grafik tersebut dapat dilihat adanya tren kenaikan dari AHH di Kota Madiun, dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 mengalami kenaikan, hal tersebut disebabkan karena dukungan faktor kesehatan berupa:

- a. Adanya skrining faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif. Skrining faktor risiko PTM ini digunakan untuk menemukan dan menangani PTM sedini mungkin. Dengan adanya transisi epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat dibandingkan dengan penyakit menular.

- b. Capaian imunisasi dasar lengkap pada balita di Kota Madiun sudah memenuhi target.
- c. Pemantauan status kesehatan anak balita di Posyandu Balita, anak sekolah/remaja di kegiatan UKS dan pemeriksaan kebugaran, dilaksanakannya deteksi dini risiko kanker leher rahim dan payudara pada wanita usia subur dan pemantauan status kesehatan lansia melalui Posyandu Lansia.
- d. Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2018 adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM
2. Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan
3. Upaya Kesehatan Masyarakat
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)

Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota

Tabel III.8
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota

Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Indeks layanan infrastruktur dan Transportasi Kota	93,52%	107,86%	115,28	Sangat Baik

Keterangan : Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan Kota Madiun Tahun 2018

Sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur, pemukiman dan prasarana transportasi kota diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu indeks layanan infrastruktur dan transportasi kota. Indikator kinerja indeks layanan infrastruktur merupakan indikator komposit,

yang meliputi beberapa indikator spesifik yang lebih operasional, antara lain prosentase panjang jalan dalam kondisi baik, persentase bangunan gedung yang sesuai ketentuan, serta persentase kawasan bebas banjir/genangan.

Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik menunjukkan seberapa panjang jalan kota yang berkondisi baik dari seluruh panjang jalan kota. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, pada tahun 2018 panjang jaringan jalan kota seluruhnya mencapai 433.095 km. Dari total panjang jalan tersebut, jalan yang sudah dalam kondisi baik mencapai 409,320 km, sehingga persentase jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018 mencapai 94,51%. Persentase bangunan gedung yang sesuai ketentuan menunjukkan seberapa banyak bangunan gedung yang sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah seluruh bangunan gedung yang ada. Sesuai data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bahwa data bangunan gedung tahun 2018 sudah seluruhnya 100% sesuai dengan ketentuan. Sedangkan persentase kawasan bebas banjir/genangan menunjukkan kawasan-kawasan tertentu di wilayah Kota Madiun yang relative rawan terjadi banjir/genangan terutama ketika musim penghujan. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, pada tahun 2018 luas kawasan rawan banjir/genangan adalah seluas 1,45 Ha. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah kota seluruhnya seluas 33,23 Ha, maka persentase kawasan bebas banjir/genangan adalah sebesar 95,64%.

Dengan menghitung rata-rata realisasi ketiga indikator operasional tersebut, maka didapatkan angka besaran indeks layanan infrastruktur pada tahun 2018 adalah sebesar 96,72. Dengan membandingkan target indeks layanan infrastruktur tahun 2018 sebesar 96,03 terhadap realisasi tahun 2018 sebesar 96,72, maka diperoleh capaian bahwa indeks layanan infrastruktur mencapai 100,71%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja

ini sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan tahun 2018, dengan capaian kinerja sebesar 100,71%.

Untuk capaian indeks transportasi kota Tahun 2018 mencapai 119%, di mana jumlah rambu Tahun 2018 sebanyak 2.576 unit rambu dan warning light sebanyak 43 unit. Untuk penghitungan rumus indeks transportasi kota yaitu jumlah perlengkapan jalan tahun ini dibagi jumlah kebutuhan perlengkapan jalan dikali 100%. Tahun 2018 jumlah perlengkapan jalan = 2.619 dan jumlah kebutuhan perlengkapan jalan = 2.209.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2018 adalah :

1. Program Pembangunan jalan dan jembatan
2. Program peningkatan kualitas pembangunan gedung dan infrastruktur kota
3. Program pengendalian banjir
4. Program pembangunan saluran/drainase/gorong-gorong
5. Program lingkungan sehat perumahan
6. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ
7. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
8. Program peningkatan pelayanan angkutan

Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel III.9
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Indeks kualitas lingkungan hidup	64,16	64,22	100,09	Sangat Baik
Persentase Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	100%	100	Baik

Keterangan : Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2018

Sasaran meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu indeks kualitas lingkungan hidup dan Persentase Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW. Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indikator kinerja yang komposit, gabungan dari tiga indikator operasional yaitu indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan. Perhitungan indeks kualitas air dan udara mengacu pada baku mutu atau standard yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Sedangkan perhitungan indeks tutupan lahan menggunakan standard luas kawasan hutan di setiap daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup menggunakan pembobotan untuk masing-masing komponen tersebut (air, udara dan lahan) dengan besaran bobot masing-masing adalah indeks pencemaran air sebesar 30%, indeks pencemaran udara sebesar 30% dan indeks tutupan lahan sebesar 40%.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, pada tahun 2018 diperoleh data bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Kota Madiun adalah sebesar 64,22. Angka tersebut sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 64,16, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100,09%.

Pada pelaksanaan tahun 2018 untuk indikator kinerja sasaran Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW mencapai realisasi 100% dari target 100% dengan capaian sebesar 100%. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya sudah dilakukan pengendalian melalui monitoring, pendataan dimana 100% wilayah perkotaan sudah dimanfaatkan.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2018 adalah :

1. Perlindungan dan Konservasi lingkungan hidup
2. Peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup
3. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
4. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
5. Perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang

Sasaran Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja

Tabel III.10

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja

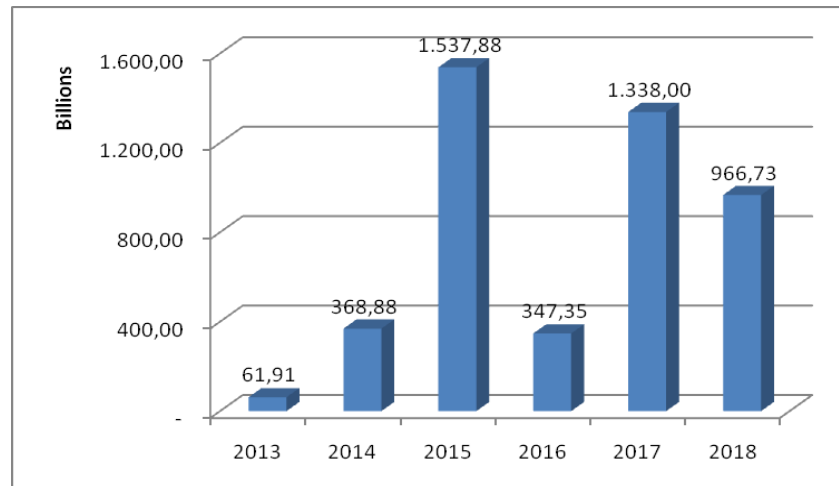
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
a. Persentase pertumbuhan nilai investasi	-75,95%	-30,38%	160	Sangat Baik
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,55%	0,81%	185	Sangat Baik

Keterangan : Data dari Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Tahun 2018

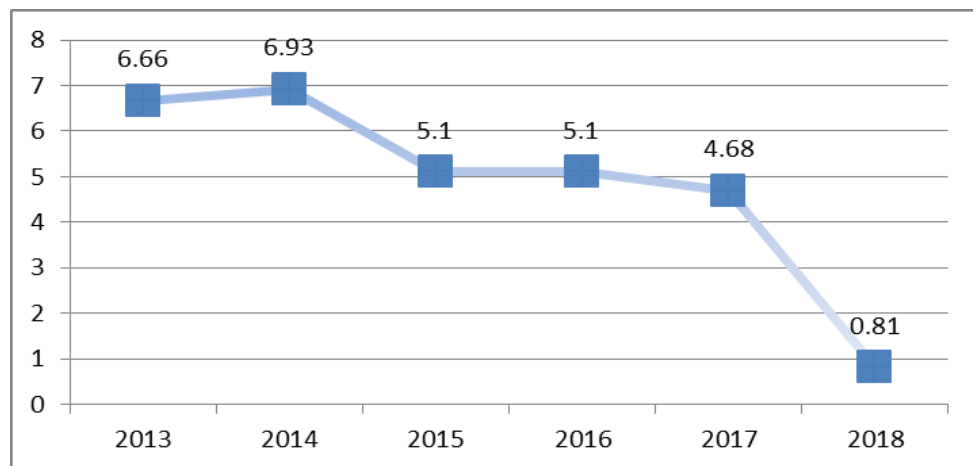
Iklim investasi yang kondusif ditandai dengan pertumbuhan investasi yang berarti meningkatnya nilai investasi baik yang berskala nasional (PMDN) maupun asing (PMA). Pertumbuhan nilai investasi di Kota Madiun tahun 2018 ditargetkan sebesar -75,95%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun, diperoleh data nilai realisasi investasi tahun 2018 sebesar Rp. 966.733.731.153,00. Sedangkan nilai realisasi investasi tahun sebelumnya Tahun 2017 sebesar Rp. 1.388.509.185.914,00. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dihitung pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2018 adalah sebesar -30,38 %. Angka tersebut jauh melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 160%. Nilai investasi sangat bergantung pada pihak ketiga (investor) dan dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga cenderung sulit diprediksi dan nilainya sangat fluktuatif. Alasan turunnya target dari Tahun 2017 ke Tahun 2018 adalah 1. Peralihan dari sistem manual ke sistem OSS/ Online Single Submission (dengan adanya sistem peralihan ini, maka jangka waktu penerbitan ijin menjadi lama)

2. Tidak ada perpanjangan SIUP (tidak ada jangka waktu berlakunya SIUP, jadi berlaku secara terus-menerus).

Perkembangan nilai investasi selama rentang waktu tahun 2013 sampai dengan 2018 sebagaimana grafik di bawah.



Gambar III.8
grafik perkembangan nilai realisasi investasi Kota Madiun tahun 2013 - 2018



Gambar Grafik III.9 :
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah

penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Begitu juga di Kota Madiun Tingkat penganggura terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. Pada Tahun 2017 Tingkat penganggura terbuka (TPT) Kota Madiun sebesar 4,68 %, hal ini mengalami penurunan sebesar 3,87 % dari tahun 2018 dengan prosentase sebesar 0,81 %. Penghitungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat diukur dengan cara mengukur perbandingan jumlah pengangguran dibanding dengan jumlah penduduk angkatan kerja dikali seratus dimana jumlah pengangguran di Kota Madiun sebanyak 1.394 orang sedangkan jumlah penduduk angkatan kerja (sumber data diambil dari Dispendukcapil, penduduk usia 15-65 tahun baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja) sebanyak 171.137 orang.

Dari perhitungan diatas terdapat penurunan TPT, hal ini disebabkan adanya program kerjasama antara Dinas Ketenagakerjaan dengan perusahaan-perusahaan dalam rekrutmen tenaga kerja dan kegiatan penyebarluasan lowongan kerja ke masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial, banyaknya jumlah lulusan sekolah yang memiliki ketrampilan sehingga dapat memenuhi lowongan yang tersedia, daya saing kompetensi ketenagakerjaan yang sudah meningkat dengan telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi serta kewirausahaan yang dapat meningkatkan wirausaha baru.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2018 adalah :

1. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
2. Peningkatan pelayanan perijinan

3. Perlindungan dan pengembangan kelembagaan ketenagakerjaan
4. Stabilisasi ekonomi daerah
5. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja

Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor-Sektor Unggulan Daerah

Tabel III.11
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	23,71	23,21*	97,89	Baik
Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	17,16	17,48	101,86	Sangat Baik
Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,17	8,63	140	Sangat Baik

Keterangan : - Data dari Dinas Perdagangan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun Tahun 2018

*- *realisasi Tahun 2017*

Sektor perdagangan, industri dan pariwisata (akomodasi dan makan minum) merupakan sektor yang dominan kontribusinya terhadap PDRB Kota Madiun dalam beberapa tahun terakhir. Sektor-sektor tersebut memang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan karena Kota Madiun merupakan pusat perdagangan serta perbelanjaan di wilayah Jawa Timur Bagian Barat. Selain itu dengan semakin berkembangnya usaha ritel seperti supermarket dan swalayan secara tidak langsung akan mampu meningkatkan peranan sektor ini.

Indikator kinerja persentase pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, industri dan pariwisata digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah. Persentase pertumbuhan dihitung menggunakan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga

Konstan (ADHK), yaitu dengan membandingkan selisih antara angka PDRB tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya pada masing-masing sektor tersebut, dibagi dengan angka PDRB sektor tersebut pada tahun sebelumnya dikalikan 100%. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Madiun, realisasi PDRB (ADHK) tahun 2018 sektor perdagangan mencapai nilai 9.488,0 milyar rupiah. Sedangkan realisasi PDRB (ADHK) tahun 2017 sektor perdagangan mencapai nilai 9.486,1 milyar rupiah. Berdasarkan data realisasi tersebut, maka didapatkan besaran pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2018 adalah sebesar 23,21%. Dengan menggunakan cara penghitungan yang sama, maka didapatkan pertumbuhan sektor industri adalah sebesar 17,48% serta pertumbuhan sektor pariwisata adalah sebesar 8,63%.



Gambar III.10

Eksistensi Pasar Tradisional yang ada di Kota Madiun

Fasilitas perdagangan yang berperan menggerakkan perekonomian di Kota Madiun diantaranya adalah tersedianya pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Aktivitas perdagangan di pasar-pasar tersebutlah yang sangat berperan dalam meningkatkan kontribusi sektor perdagangan. Jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah sejumlah 17 unit pasar yang tersebar dalam 3 Kecamatan di Kota Madiun, dengan salah satu diantaranya adanya Pasar Besar Madiun yang menampung pedagang dari wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

Sektor industri merupakan kontributor terbesar kedua terhadap PDRB Kota Madiun. Pada tahun 2018 sektor industri mampu memberikan kontribusi sebesar 17,48%. Peranan terbesar pada sektor industri adalah pada sub sektor industri alat angkutan serta industri makanan dan minuman. Industri alat angkutan didominasi oleh industri besar, sedangkan industri makanan dan minuman didominasi oleh industri kecil. Melihat luas wilayah Kota Madiun yang relative kecil, pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga merupakan pilihan strategi yang lebih realistis. Beberapa pelatihan telah diberikan kepada industri kecil dan industri rumah tangga, seperti pelatihan pembuatan aneka kue maupun pelatihan pengemasan makanan yang ditujukan bagi pelaku industri makanan dan minuman.



Gambar III.11

Salah satu bentuk pelatihan industri yang diadakan di Kota Madiun

Secara umum, besarnya kontribusi sektor industri akan sangat tergantung pada kedua sub sektor tersebut. Apabila kontribusi kedua sub sektor ini naik, maka kontribusi sektor industri juga akan naik, namun manakala kontribusi kedua sub sektor ini turun, maka akan menurun pula kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Sedangkan sektor pariwisata dihitung dengan menggunakan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Dikarenakan Kota Madiun tidak mempunyai destinasi wisata yang bersifat alam, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor tersebut adalah dengan mengembangkan wisata buatan maupun wisata budaya. Sektor pariwisata merupakan sektor yang masih potensial untuk dikembangkan, terutama dari subsektor penyediaan akomodasi. Dengan semakin banyaknya hotel yang berdiri di Kota Madiun, seharusnya juga diimbangi dengan pengembangan berbagai fasilitas pendukung untuk menarik wisatawan datang dan berkunjung ke Kota Madiun. Misalnya melalui pengembangan budaya khas Kota Madiun, pengembangan makanan khas, serta memperbanyak even-even yang diselenggarakan di Kota Madiun.



Gambar III.12

Benchmarking logo city branding Kota Madiun dengan beberapa kota lain

Penetapan tari khas daerah Kota Madiun serta launching city branding Kota Madiun sebagai “Kota Karismatik” diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sub sektor ini pada masa yang akan datang. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kontribusi sektor ini pada masa yang akan datang.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2018 adalah :

1. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2. Pengelolaan pasar rakyat
3. Pengembangan system pendukung kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM

4. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan
5. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
6. Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah)
7. Pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata
8. Pengelolaan kekayaan budaya

**Sasaran Meningkatnya Keamanan, Ketertiban,
Dan Kerukunan Dalam Masyarakat**

Tabel III.12

Kinerja Sasaran meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat

Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan kerukunan dalam masyarakat				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
Persentase potensi konflik yang diselesaikan	100%	100%	100	Sangat Baik
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan)	97%	98,95%	100	Sangat Baik

Keterangan : Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2018

Sasaran meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat diukur dengan indikator kinerja persentase potensi konflik yang diselesaikan dan persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan). Untuk penghitungan rumus potensi konflik yang diselesaikan Tahun 2018 = potensi konflik yang diselesaikan dibagi potensi konflik seluruhnya dikali 100%, dengan jumlah 52 potensi konflik yang diselesaikan dibagi 52 potensi konflik seluruhnya dikali 100% didapatkan hasil 100%.

Pada tahun 2018 ditargetkan bahwa kalau misalkan terjadi potensi konflik di Kota Madiun, maka sedapat mungkin akan diselesaikan. Identifikasi kemungkinan terjadinya konflik sudah di-

petakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun dengan pembuatan peta rawan konflik di Kota Madiun. Namun demikian berdasarkan data laporan yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bahwa selama tahun 2018, situasi dan kondisi Kota Madiun sangat kondusif dan relatif damai, tidak terjadi konflik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa potensi terjadinya konflik sudah berhasil diantisipasi dan diselesaikan, tidak sampai terjadi konflik yang meluas, sehingga indikator ini sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100%. Upaya persuasif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam melakukan pencegahan konflik selama ini yaitu dengan mengadakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menciptakan kerukunan dan nilai luhur budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengundang warga dari berbagai macam tokoh agama serta warga pendatang yang berasal dari luar suku jawa yang berdomisili di Kota Madiun.

Sedangkan untuk penghitungan rumus Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran K3}}{\text{Jumlah pelanggaran K3}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.708}{4.758} \times 100\% = 98,95\%$$

Dengan demikian indikator kinerja sasaran Angka Pelanggaran Ketertiban Umum ditahun 2018 sebesar 98,56% dan dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 98,01% sehingga mengalami kenaikan sebesar 0,94%. Capaian target indikator kinerja sasaran ditahun 2018 sebesar 97% sehingga telah mencapai target RKT tahun 2018. Kenaikan ini terjadi dikarenakan bahwa isu strategis pelanggaran ketertiban umum ditahun 2018 pada pelanggaran reklame. Hal ini seiring dengan tahun 2018 merupakan tahun politik pemilihan umum Kepala Daerah/ Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun sehingga pelanggaran reklame yang ada ditindaklanjuti oleh petugas Satuan Polisi Pamong

Praja melalui kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan patroli pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kendala :

Keberadaan beberapa perguruan bela diri di Kota Madiun dengan berbagai acara yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan yang berbeda, seringkali menjadi pemicu awal munculnya pertentangan dan benturan antar kelompok masyarakat, terutama pada waktu-waktu tertentu ketika salah satu kelompok sedang mengadakan acara.

Upaya Mengatasi :

1. Adanya peta rawan konflik yaitu suatu kajian tentang wilayah rawan konflik di Kota Madiun. Hasil yang diharapkan dari pemetaan rawan konflik adalah untuk mengantisipasi tidak terjadinya potensi konflik sosial terutama memberikan gambaran dan pemetaan rawan konflik sosial di Kota Madiun, sehingga potensi konflik bisa terdeteksi dan tidak terjadi di Kota Madiun.
2. Meningkatkan dialog antar kelompok, menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, melakukan upaya pemantauan dalam rangka pencegahan dan deteksi dini.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Madiun tahun 2018, total anggaran belanja tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.285.587.599.826,46. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 588.015.295.942,46 dan belanja langsung sebesar Rp. 697.572.303.884,00. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Kota Madiun tahun 2018 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel III.13

Realisasi APBD Kota Madiun tahun 2018

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	588.015.295.942,46	407.189.651.558,00	69,25
Belanja Langsung	697.572.303.884,00	629.473.697.170,75	90,24
Total APBD	1.285.587.599.826,46	1.036.663.348.728,75	80,64

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

Anggaran Belanja Langsung sebagaimana tabel tersebut terdiri dari program-program rutin operasional kantor yang melekat pada seluruh perangkat daerah serta program-program strategis masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya. Adapun besaran anggaran dan realisasi belanja langsung untuk program rutin dan operasional seluruh perangkat daerah adalah sebagaimana berikut :

Tabel III.14

Realisasi Belanja Langsung untuk Program rutin dan operasional seluruh Perangkat Daerah

No	Program rutin operasional	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Program pendukung (4 program)	130.752.339.339	113.489.424.836	86,80

Sedangkan anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.15

Penyerapan anggaran per sasaran sesuai APBD tahun 2018

No	Sasaran strategis	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	504.908.220,00	457.713.531,00	90,66
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	2.135.468.000,00	1.779.619.964,00	83,34
3	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	31.350.018.702,00	27.374.572.964,00	87,32
4	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	38.154.615.320,00	32.477.774.177,00	85,12
5	Meningkatnya kualitas pendidikan	88.950.760.296,00	80.500.186.494,70	90,50
6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	164.169.654.000,00	156.450.386.119,80	95,30
7	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	157.259.228.910,00	143.043.603.187,00	90,96

No	Sasaran strategis	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
8	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	31.437.066.790,00	29.061.508.610,00	92,44
9	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	4.834.041.661,00	4.359.903.343,00	90,20
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah	34.289.280.948,00	29.809.649.178,00	86,94
11	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat	13.734.921.698,00	10.669.354.766,00	77,68
Total Belanja Langsung		566.819.964.545,00	515.984.272.334,50	91,03

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada program/kegiatan di sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat”, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 95,30%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada program/kegiatan di sasaran “Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat”, dengan penyerapan anggaran hanya sebesar 77,68%.

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2018 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

Tabel III.16

Efisiensi anggaran belanja per sasaran tahun 2018

No	Sasaran strategis	Rata-rata capaian kinerja	% Serapan anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	>100 (Target Tercapai)	90,66	10,14%
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	<100 (Target Tidak Tercapai)	83,34	Belum efektif
3	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	>100 (Target Tercapai)	87,32	12,68%
4	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	>100 (Target Tercapai)	85,12	14,88%
5	Meningkatnya kualitas pendidikan	>100 (Target Tercapai)	90,50	9,5%
6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	<100 (Target Tidak Tercapai)	95,30	Belum efektif
7	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	>100 (Target Tercapai)	90,96	24,32%
8	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	>100 (Target Tercapai)	92,44	7,605%
9	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	>100 (Target Tercapai)	90,20	82,3%
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah	>100 (Target Tercapai)	86,94	26,31%
11	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat	>100 (Target Tercapai)	77,68	23,32%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja tahun 2018 pada masing-masing sasaran sudah berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang sudah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya sudah efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diper-

lukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan. Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, meskipun terlihat dari serapan anggaran yang belum mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian sasaran, tujuan dan misi pemerintah daerah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Pemerintah Kota Madiun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan sesuai dengan arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kota Madiun pada tahun 2018 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi seluruh komponen serta pemangku kepentingan (*stakeholder*). Untuk itu diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan pada periode selanjutnya, sehingga target akhir sasaran, tujuan dan misi serta visi RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 dapat terwujud. Sedangkan untuk target yang belum tercapai tentunya diperlukan kerja keras, kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak.

Keterbatasan ketersediaan data, terutama data-data yang seharusnya disediakan oleh pihak diluar Pemerintah Kota Madiun, namun ternyata sampai dengan disusunnya laporan ini data tersebut masih belum tersedia menyebabkan pengukuran capaian kinerja belum bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga tidak dapat dilaporkan keberhasilan ataupun kegagalan seluruh sasaran dan tujuan pada masing-masing misi. Secara umum, sebagian besar sasaran sudah berhasil dicapai, terbukti dengan pemenuhan target pada indikator-indikator kerjanya. Namun demikian, masih dijumpai adanya beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan, sehingga hal tersebut menunjukkan masih adanya kendala dan hambatan serta

permasalahan yang perlu untuk lebih mendapatkan perhatian pada periode tahun-tahun berikutnya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah :

- a. Terjadinya trend pelambatan laju pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor ekonomi unggulan terhadap PDRB Kota Madiun seperti sektor perdagangan ;
- b. Adanya perubahan regulasi tentang pemerintahan daerah yang tidak segera diikuti dengan penerbitan petunjuk teknis maupun petunjuk operasional pelaksanaannya menyebabkan tertundanya pelaksanaan program dan kegiatan yang berakibat pada tertundanya penyelesaian program dan pencapaian target;

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Pemerintah Kota Madiun antara lain :

1. Dibutuhkan komitmen yang kuat seluruh jajaran Pemerintah Kota Madiun akan pentingnya SAKIP, adanya kebijakan yang memwadahi penerapan SAKIP, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar tercipta kejelasan arah penerapan SAKIP yang baik dan benar sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
2. Dikarenakan potensi dan karakteristik wilayah Kota Madiun yang memang kurang mendukung sektor pertanian, maka penurunan kontribusi sektor ini harus diimbangi dengan peningkatan kontribusi pada sektor yang lain sehingga trend kenaikan laju pertumbuhan ekonomi bisa terjaga;
3. Lebih meningkatkan koodinasi dan konsultasi dengan berbagai instansi pemerintah terutama pemerintah pusat sebagai penerbit regulasi dan kebijakan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan lancar sesuai dengan ketentuan.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi berbagai pihak yang membutuhkan, upaya perbaikan pelaksanaan program dan

kegiatan, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan pada masa yang akan datang.

\$\$***\$\$

LAMPIRAN

PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2014-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PENGHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	jumlah jenis usulan yang masuk RKPD dibagi jumlah jenis usulan masyarakat di kali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1/3 (X_{keter (1)} + x_{keter (2)} + I_{ind. dic})$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Meningkatnya Tata Kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Madiun	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Kota Madiun	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat terhadap sejumlah perangkat daerah dan unit kerja	
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kota Madiun	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Akhir dari pemeringkatan keterbukaan Badan Publik berupa Kualifikasi : a. Informatif dengan nilai 97-100 b. Menuju Informatif dengan nilai 80-96 c. Cukup Informatif dengan nilai 60-79 d. Kurang Informatif dengan nilai 40-59 e. Tidak Informatif dengan nilai <39	Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Rangkuman dari empat kategori penilaian : a. Angka partisipasi Pendidikan Dasar b. Angka melek huruf usia 15 tahun ke atas c. Angka partisipasi menurut kesetaraan gender d. Angka bertahan siswa hingga kelas V SD	Dinas Pendidikan

- 2 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PENGHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
6.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	hidup yang bisa dijalani oleh seseorang yang lahir pada periode tersebut atau Perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
7.	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Indeks Layanan Infrastruktur dan Transportasi	Indeks layanan Infrastruktur ditambah indeks Transportasi di bagi dua	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan
8.	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran air dikali 30% ditambah Indeks Pencemaran Udara dikali 30% ditambah Indeks tutupan Lahan dikali 40%	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW	Luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibagi total luas wilayah x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9.	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Nilai Investasi Tahun ini di kurangi nilai investasi Tahun lalu di bagi nilai investasi Tahun lalu x 100%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja x 100%	Dinas Tenaga Kerja
10.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor-sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor perdagangan tahun ini di kurangi nilai PDRB sektor perdagangan tahun lalu di bagi nilai PDRB sektor perdagangan tahun lalu x 100%	Dinas Perdagangan
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Nilai PDRB Sektor Industri tahun ini di kurangi nilai PDRB sektor industri tahun lalu di bagi nilai PDRB sektor industri tahun lalu x 100%	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	Nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum tahun ini di kurangi nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum tahun lalu di bagi nilai PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum tahun lalu x 100%	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

- 3 -

1 NO	2 SASARAN STRATEGIS	3 INDIKATOR KINERJA UTAMA	4 RUMUS PENGHITUNGAN / PENJELASAN	5 PENANGGUNG JAWAB
11.	Meningkatnya Ketertiban dan dalam Masyarakat	Keamanan, Kerukunan Persentase Potensi Konflik yang diselesaikan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Potensi Konflik yang diselesaikan di bagi Potensi Konflik Seluruhnya di kali 100% Jumlah Pelanggaran K3 yang ter selesaikan di Bagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi Satpol PP x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja

 WALIKOTA MADIUN, P.

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum



WALIKOTA MADIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Jabatan : **WALIKOTA MADIUN**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Madiun, Oktober 2018

WALIKOTA MADIUN

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH KOTA MADIUN**

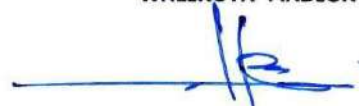
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	3	4	5
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPd	79%
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,75
3	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Sangat tinggi
		Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79
4	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	B
5	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	0,76
6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,50 Tahun
7	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Indeks Layanan Infrastruktur dan Transportasi Kota	93,52%
8	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,16
		Persentase Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%
9	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	-75,95%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,55%
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	23,71%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	17,16%
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	6,17%
11	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat	Persentase Potensi Konflik yang diselesaikan	100%
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	97%

No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	60.307.441.184
2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	17.194.326.255
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51.653.215.020
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.597.356.880
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.426.431.000
6	Program Pendidikan Dasar	63.369.488.936
7	Program Pendidikan Non Formal	889.224.000
8	Program Pendidikan Anak Usia Dini	898.536.780
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	544.625.000
10	Program BOS	20.461.686.000
11	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	17.131.401.000
12	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.600.455.000
13	Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan	40.242.164.000
14	Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD	9.133.347.000
15	Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD	75.000.000.000
16	Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	2.306.009.000
17	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit	18.756.278.000
18	Program Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong	19.932.770.370
19	Program Pengendalian Banjir	44.693.375.440
20	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	37.506.369.320
21	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	32.109.710.480
22	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	10.875.812.960
23	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	434.725.200
24	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	114.025.000
25	Program Lingkungan Sehat Perumahan	6.808.079.440
26	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	22.933.815.590
27	Program Pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas	479.445.080
28	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.034.625.800
29	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah	272.865.120
30	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	523.178.940
31	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	1.311.173.080
32	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	963.336.568
33	Program Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	3.538.468.140
34	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	1.502.754.060
35	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan	632.713.940
36	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	1.666.664.920
37	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	449.357.701
38	Program Ketransmigrasian	31.466.480
39	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	1.059.486.060
40	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	994.348.000
41	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	350.214.000
42	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan Hidup	971.624.000
43	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.752.340.000
44	Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	638.301.600
45	Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	730.778.400
46	Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Kependudukan	1.232.076.880
47	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	1.519.638.000
48	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2.124.818.000
49	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.574.629.900
50	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	5.022.994.000
51	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	205.465.000
52	Program Pengembangan Tata Kelola Persandian	90.810.000
53	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	8.579.173.800
54	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	757.636.300
55	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	839.794.300
56	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	599.989.760
57	Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan	481.860.760
58	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	5.096.981.358
59	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	1.650.528.680
60	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	2.893.812.490
61	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.360.768.580

No	Program	Anggaran
62	Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	487.231.960
63	Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah Pemerintah Daerah	249.102.000
64	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1.514.508.452
65	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	588.242.000
66	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	785.617.000
67	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.082.826.730
68	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.005.305.840
69	Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	1.089.121.960
70	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	2.946.983.280
71	Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa	654.850.560
72	Program Peningkatan Kapasitas DPRD	16.203.012.000
73	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	163.403.040
74	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	959.128.470
75	Program Penataan Aparatur	238.256.040
76	Program Fasilitas Kesejahteraan PNS	217.422.080
77	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	2.002.992.040
78	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.180.334.000
79	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	248.425.000
80	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3.429.651.000
81	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	661.741.000
82	Program Peningkatan Pelayanan dan Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah	763.423.000
83	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	442.100.000
84	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	142.675.000
85	Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	42.729.000
86	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	537.226.000
87	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	1.082.467.120
88	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	131.915.440
89	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	123.565.440
90	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	237.611.840
91	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.067.109.980
92	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	202.006.620
93	Program Penyelenggaraan Kelurahan	5.120.294.460
94	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	108.354.240
95	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Kelurahan	56.154.240
96	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	280.439.240
97	Program Penyelenggaraan Kelurahan	5.160.074.110
98	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	110.015.060
99	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Kelurahan	62.647.060
100	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	137.620.320
101	Program Penyelenggaraan Kelurahan	4.481.793.740
102	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	167.737.620
103	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	213.556.900
104	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	532.068.440
105	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	723.678.020
106	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan	575.476.150
107	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	12.735.106.500
108	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan	1.397.951.960
109	Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan / Pemasaran Hasil Perikanan	1.057.776.220
110	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	871.180.000
111	Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport serta Efisiensi Perdagangan Dalam	1.485.638.000
112	Program Pembinaan PKL dan Asongan	104.825.880
113	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	4.854.143.280
Jumlah Anggaran		697.572.303.884

Madiun, Oktober 2018

WALIKOTA MADIUN



H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.